



## Penerapan Platform Informasi Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

### *Implementation of the Integrated Social Welfare Data Services Information Platform (DTKS)*

Lusi Ariyani<sup>1\*</sup>, Achmad Sarwandianto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI, Indonesia

\*Korespondensi penulis: [achmad12@gmail.com](mailto:achmad12@gmail.com)

---

#### **Article History:**

Received: Januari 03, 2024

Revised: Januari 20, 2025

Accepted: Februari 08, 2025

Published: Februari 11, 2025

**Keywords:** Assistance, DTKS, Poor, Social.

**Abstract:** According to Article 11 Paragraph 2 of Law number 13 of 2011 concerning Handling of the Poor, the government and regional governments can provide assistance and/or empowerment based on integrated data that has been created by the minister. DTKS is household based, but the poverty alleviation program uses social assistance and community empowerment based on families and individuals. The Family Hope Program (PKH) and Social Food Assistance are examples of family-based social assistance and community empowerment. Regional governments face several problems with population administration which is still carried out manually, using population registers, and local people are not aware of the poor administration system and do not report it. If population data changes. Therefore, it is necessary to apply information technology to certain areas in managing population administration, which is very important considering the population continues to grow.

---

#### **Abstrak**

Menurut Pasal 11 Ayat 2 Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan berdasarkan data terpadu yang telah dibuat oleh menteri. DTKS berbasis rumah tangga, tetapi program pengentasan kemiskinan menggunakan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis keluarga dan perorangan. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Pangan adalah contoh bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis keluarga. Pemerintah daerah menghadapi beberapa masalah administrasi kependudukan masih dilakukan secara manual, menggunakan buku induk kependudukan, dan masyarakat daerah tidak menyadari sistem administrasi yang buruk dan tidak melaporkan. Jika data populasi berubah. Oleh karena itu perlu adanya penerapan ke daerah tertentu memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi kependudukan sangat penting mengingat populasi yang terus berkembang.

**Kata Kunci:** Bantuan, DTKS, Miskin, Sosial.

## **1. PENDAHULUAN**

Kemiskinan selalu menjadi tujuan pembangunan, yang dilakukan secara berkesinambungan dari satu periode pemerintah ke periode yang lain, karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Sampai saat ini, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih besar.

Program Bantuan Sosial disediakan untuk masyarakat miskin, tidak mampu, dan marginal oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Menurut

peraturan perundang-undangan, program ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi kemiskinan di negara ini. Bantuan sosial reguler dan khusus adalah dua jenis bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah yang mengelola Kemensos. Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu sembako adalah bantuan sosial umum. Penerima Bantuan Iuran (PBI), termasuk jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), juga merupakan bantuan sosial lainnya sebagaimana diatur oleh undang-undang yang mengatur sistem jaminan sosial nasional (SISN).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 57/HUK/2017 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia memperoleh mandat untuk melakukan verifikasi dan validasi data setiap dua tahun sekali (Perempuan, 2017).

Salah satu inisiatif pemerintah untuk membantu orang-orang yang kurang mampu adalah dengan adanya Sistem Layanan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu, yang juga dikenal sebagai DTKS. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan dengan cara yang tepat. Untuk menerima bantuan pendapatan DTKS, warga harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti: memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan dan tidak memenuhi kebutuhan pokok.

Sebagai bentuk penjangkauan lebih maksimal dan efektif ke masyarakat, dibutuhkan adanya penerapan *E-Government*, terutama di bidang birokrasi dan peningkatan kualitas layanan dalam bidang kesejahteraan sosial. *E-Government* mengacu pada penerapan teknologi digital dalam ranah pemerintahan untuk meningkatkan penyediaan layanan kepada Masyarakat (Chaharani et al., 2020) (Andriyansah, 2022).

Saat ini, Pusdatin Kesos Dinas Sosial DKI Jakarta menggunakan sistem melalui *web*, sehingga terkadang terjadi gangguan sistem seperti *downtime* sistem dan lambatnya kinerja server. Hal ini menimbulkan beberapa masalah, seperti kesulitan mendapatkan akses, situs *web* yang lambat atau layanan *customer* yang tidak responsif sehingga dapat membuat orang yang membutuhkan informasi tentang bantuan sosial kesulitan mendapatkan layanan dan informasi yang mereka butuhkan. Hal ini dapat membuat proses mengajukan permohonan bantuan, memeriksa status permohonan, atau menerima bantuan yang mereka butuhkan menjadi lebih sulit bagi mereka. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada sistem bantuan jika masalah ini tidak diselesaikan. Dengan kehilangan kepercayaan, individu yang membutuhkan bantuan sosial dapat menolak untuk menggunakan layanan ini.

Adanya kendala tersebut, maka perlu dibuat kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terkait penyuluhan tentang info *Platform* DTKS. Aplikasi pengolah data kesejahteraan sosial merupakan program dalam proses perbaikan dan pengusulan data basis terpadu yang di dalamnya terdapat modul untuk perbaikan dan pengusulan data bantuan sosial kepada masyarakat sehingga terverifikasi dan tervalidasi sehingga dapat menurunkan data kemiskinan (Andriani et al., 2023).

## **2. METODE**

Metode yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian adalah sebagai berikut: (1) tim pengabdian bekerja sama dengan Ketua RT dan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menguraikan kebutuhan apa yang paling penting bagi pemerintah daerah; (2) tim pengabdian menguraikan rencana program sesuai dengan kebutuhan khalayak sasaran dan menguraikan metode pelaksanaan, seperti substitusi teknologi dan pelatihan; dan (3) tim pengabdian membuat aplikasi Sistem Administrasi Kependudukan, masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian dengan jumlah 8 orang. Masyarakat juga berpartisipasi dalam pelatihan dan bertanggung jawab untuk menjalankan aplikasi Sistem Administrasi Kependudukan yang diakses melalui internet. Beberapa masyarakat juga terlibat dalam pelatihan ini.

Ilmu pengetahuan yang ditransfer untuk menyelesaikan masalah mitra, termasuk pengetahuan dan keterampilan tentang perangkat administratif masyarakat yang digunakan melalui aplikasi Sistem Administrasi Kependudukan. Indikator keberhasilan program: pengembangan wilayah berbasis *Information Technology* dapat diukur dengan membuat *platform* informasi kependudukan; pergeseran pola kerja administrasi kependudukan dari manual yang menggunakan Buku Induk Kependudukan menjadi menggunakan aplikasi sistem informasi kependudukan DTKS; dan aplikasi sistem informasi kependudukan termasuk pusat informasi kependudukan dan berkas administrasi kependudukan secara *online*.

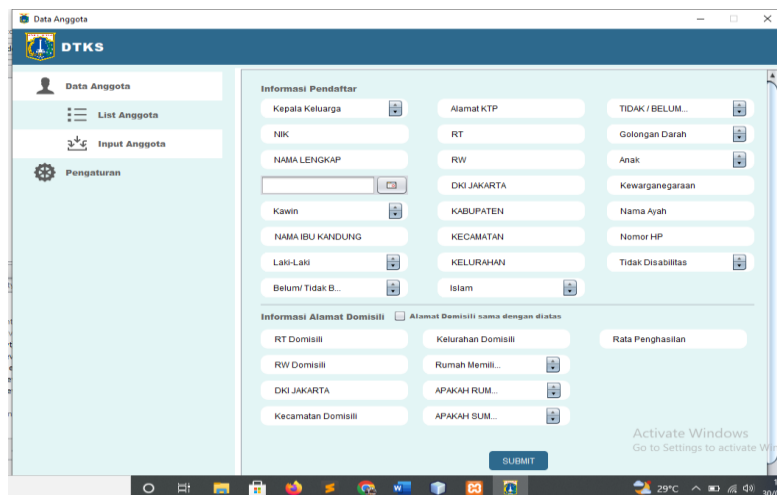
## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data kependudukan ditemukan tidak tertib dan tidak terkini, menurut temuan tim pengabdian untuk kegiatan identifikasi masalah, administrasi kependudukan dicatat secara manual menggunakan surat pengantar administrasi kependudukan yang diminta. Kemampuan dan alat daerah untuk mengelola administrasi kependudukan berbasis teknologi dan kesadaran masyarakat untuk mengelola administrasi kependudukan dalam situasi di mana perubahan data rendah. Masyarakat biasanya menangani administrasi kependudukan jika ada keperluan untuk

mengurangi biaya rumah sakit, menikah, atau merantau ke luar kota. Ini karena pengetahuan dan keterampilan perangkat daerah, terutama karena pelayanan masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan era digital.

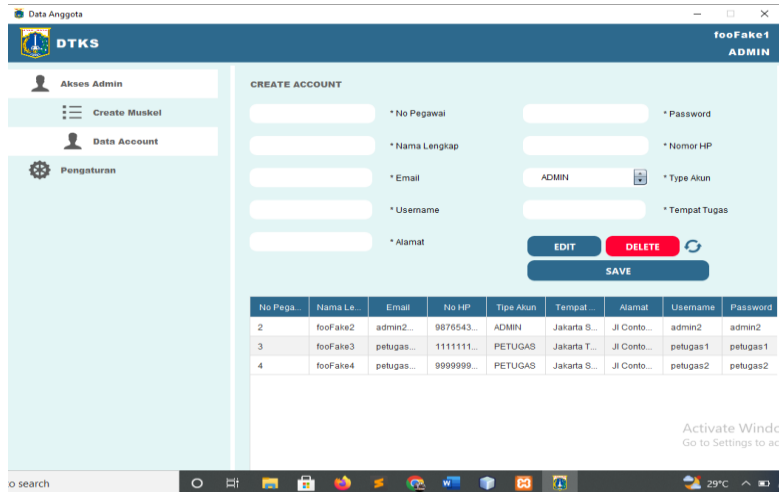
Hirarki fungsi sistem informasi pendaftaran Sistem Informasi dan Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial DKI Jakarta adalah membantu peserta pengabdian kepada masyarakat dapat:

- a. Melakukan pendataan pendaftaran untuk registrasi warga;
- b. Melakukan pengecekan data warga dan memberikan informasi tentang pengecekan data; dan
- c. Melakukan pendataan hasil pengecekan data warga dan memberikan arahan lanjutan kepada warga.
- d. Warga menerima surat sebagai bukti bahwa mereka telah mendaftar dan terdata dengan baik di Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- e. Warga hanya tinggal menunggu berita tambahan tentang konfirmasi DTKS.



**Gambar 1. Formulir Registrasi DTKS (Tim, 2024)**

Tahap ini, data warga yang membutuhkan layanan kesejahteraan sosial didaftarkan terlebih dahulu sebagai bagian dari prosedur bisnis ini. Masyarakat kini diwajibkan mengisi formulir pendaftaran dan membubuhkan dokumen pendukung, seperti akta kelahiran dan kartu identitas. Setelah pendataan, dilakukan verifikasi untuk memastikan keakuratan data warga yang disampaikan.



No Pega...	Nama Le...	Email	No HP	Type Akun	Tempat	Alamat	Username	Passwor
2	foofake2	admin2...	9876543...	ADMIN	Jakarta S...	Jl Conto...	admin2	admin2
3	foofake3	petugas...	1111111...	PETUGAS	Jakarta T...	Jl Conto...	petugas1	petugas1
4	foofake4	petugas...	9999999...	PETUGAS	Jakarta S...	Jl Conto...	petugas2	petugas2

**Gambar 2. Formulir Data Musyawarah Kelurahan (MusKel) DTKS (Tim, 2024)**

Setelah verifikasi data, pemeriksaan kelayakan adalah langkah selanjutnya dalam *platform* ini. Pada titik ini, sistem akan menilai data yang dikumpulkan dan menentukan apakah masyarakat layak menerima manfaat kesejahteraan sosial atau tidak.

Pusdatin dan Dinas Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta bekerja sama dengan sejumlah lembaga antara lain Bank DKI, Pusat Pelayanan Data dan Informasi Nasional, serta lembaga terkait lainnya untuk memantau dan menilai layanan sistem DTKS. Dengan begitu, alokasi bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan akan lebih tepat dan efisien.

Pada tanggal 14 September 2024, pejabat lingkungan dan sejumlah warga menghadiri pelatihan. Tim pengabdian melibatkan mahasiswa dan materi pelatihan termasuk instruksi teknis tentang penggunaan aplikasi sistem administrasi kependudukan.



**Gambar 3. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat (Tim, 2024)**

Peserta dapat menggunakan aplikasi administrasi kependudukan ini untuk mengetahui informasi tentang data kependudukan dan untuk mengajukan bantuan sosial ketika mereka tidak terdaftar di daerah. Aplikasi ini juga memungkinkan perangkat daerah untuk mengupdate data dengan cepat. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, aplikasi sistem informasi kependudukan mempermudah pendataan dan pengolahan data penduduk di Kantor Kepala Daerah, memperbaiki kesalahan penyampaian data, dan mempermudah laporan kependudukan (Sujono, 2018).

Implementasi bantuan tersalurkan pada masyarakat dengan tepat dan cepat adalah penting untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan memenuhi kebutuhan pokok. Keberhasilan penyaluran dana kesejahteraan sosial dapat diukur melalui beberapa indikator dan parameter tertentu (Prastiawati & Darma, 2016). Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menjadi penilaian keberhasilan dalam penyaluran dana kesejahteraan sosial cakupan populasi sasaran menjadi besar (Mashur, 2017).

#### 4. KESIMPULAN

Adanya sistem ini memudahkan warga untuk mendapatkan bantuan secara *online* tanpa harus datang langsung ke Dinas Sosial DKI Jakarta. Proses pendaftaran dan verifikasi menjadi lebih terkomputerisasi dan tidak memakan waktu lama. Sistem ini dibangun menggunakan proses yang dirancang oleh Pusdatin Kesos Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Perubahan dalam cara administrasi kependudukan didefinisikan sebagai keberhasilan pengabdian. Ini dimulai dengan pendataan administrasi kependudukan secara manual menggunakan Buku Induk Penduduk dan kemudian dilakukan melalui aplikasi sistem administrasi kependudukan yang berbasis *web*. Perangkat Daerah Tlangoh sekarang dapat menggunakan teknologi informasi, yang memudahkan pengelolaan data kependudukan daerah. Aplikasi sistem administrasi kependudukan dapat menambah, menghapus, dan memastikan data kependudukan daerah Tlangoh tetap aktual dan valid. *Database Sustainable Development Goals (SDGs)* daerah dapat diakses melalui ekspor *database* aplikasi sistem administrasi kependudukan. Aplikasi sistem administrasi kependudukan mempercepat pendataan SGD's daerah, yang merupakan program prioritas daerah.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Universitas Indraprasta PGRI, dan mitra program pengabdian kepada masyarakat pemerintah daerah.

## REFERENSI

- Andriani, Y., Suwitri, S., & Yuniningsih, T. (2023). Penerapan e-government melalui sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation (Siks-Ng) sebagai aplikasi pengolah data kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 11(2), 129–147.
- Andriyansah, D. (2022). Efektivitas penerapan e-government melalui sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation (Siks-Ng) sebagai aplikasi pengolah data kemiskinan di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *Jisipol Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(3).
- Chaharani, N. A., Adi, T. P., & Hasmi, D. L. (2020). Penerapan aplikasi pendaftaran antrian paspor online (Apapo) dalam perspektif e-government. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 83–88.
- Kurniawan, D., & Hadi, S. (2020). Dampak digitalisasi terhadap pengelolaan administrasi pemerintahan desa di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 8(3), 234–245.
- Mashur, D. (2017). Implementasi kebijakan program peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan (Pppmp) di Kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkalis.
- Perempuan, D. P. (2017). Perlindungan anak dan keluarga berencana 2017. Rekapitulasi data premenopause-menopause 2017.
- Prastiawati, F., & Darma, E. S. (2016). Peran pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggotanya dari sektor mikro pedagang pasar tradisional. *Journal of Accounting and Investment*, 17(2), 197–208.
- Puspitasari, M., & Ahmad, R. (2021). Evaluasi pengaruh teknologi informasi terhadap transparansi pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 112–124.
- Setiawan, J. (2019). Implementasi sistem e-Government dalam pelayanan publik di kota Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi*, 14(1), 45–58.
- Sujono, S. (2018). Penerapan aplikasi sistem informasi kependudukan berbasis web pada kantor kepala desa Puput Kecamatan Simpangkatis. *SIMETRIS*, 9(1), 707-716.